

## DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. *Sumatera Barat Dalam Angka 2015*.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik "Suatu Pengantar"*. Jakarta: Erlangga.
- Bird M, Richard., Vaillancourt, Francois. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darussalam, Danny. 2005. *Lika-Liku Menghitung Potensi Pajak*. Artikel. <http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/art.php/338>
- Davey KJ. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Penerbit: UI Press (Universitas Indonesia).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Negara. *Realisasi APBD 2010*. [www.djpkn.go.id](http://www.djpkn.go.id). Update per 20 Juli 2010.
- Edward. 2001. *Penghitungan Potensi dan Proyeksi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis. Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Ersady, Novita. 2010. *Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005-2008*. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Hariyandi. 2002. *Identifikasi Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Potensinya Di Provinsi Sumatera Barat*. Tesis. Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Jaya, W.K., Baswir, R., Bastian, I. 2000. *Kajian Profil Daerah Tingkat II Ditinjau Dari Aspek Potensi Penerimaan Daerah*. Laporan Akhir Kerjasama Dirjen Pembangunan Daerah DEPDIAGRI dengan PAU Studi Ekonomi, UGM, Yogyakarta.

Jaya, W.K.. 1996. *Analisis Keuangan Daerah: Pendekatan Makro, Model Program PMSES*. Kerjasama Ditjrn PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis, UGM, Yogyakarta.

Krisna. *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan DKI Jakarta*. Jakarta: Pustaka Universitas Indonesia.

Kunarjo, 1996, *Perencanaan dan Pembangunan*. Edisi ketiga. Jakarta: UI Press.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.

Kustowo, Yuni. 2001. *Potensi, Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Di Kabupaten Cilacap*. Tesis. Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mangoting, Yenni. 2001. *Pajak Penghasilan dalam Sebuah Kebijakan*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 3, No. 2. Hal: 142 – 156. Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra. [Http://Puslit.Petra.Ac.Id/Journals/Accounting/](http://Puslit.Petra.Ac.Id/Journals/Accounting/)

Mardiasmo, Makhfatih, A., Supomo, B., Purwanto, H. 2000. *Pengembangan Model Standar Analisa Belanja (SAB) Anggaran Daerah (APBD)*. Laporan Akhir PAU-SE UGM: Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2002. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Meier, M.G. 1995. *Leading Issues in Economics Development*, Sixth Edition, Mc. Graw Hill, International Edition Finance Series. Singapore.

Mochida, Nobuki. 2001. *Taxes and Transfers in Japan's Local Public Finances* "Karakteristik Pajak Daerah Di Jepang. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A. [www.worldbank.com](http://www.worldbank.com).

Mulyanto. 2002. *Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan Subosuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah*. Project 497-0357 / 204-000. Regional University Research On Decentralization in Indonesia. Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS). University of Maryland at College Park. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Riduansyah, Mohammad. 2003. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor*. Vol. 7, No. 2. Pusat Pengembangan dan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Sabana, Choliq. *Analisis Pengembangan Kota Pekalongan Sebagai Salah Satu Kawasan Andalan Di Jawa Tengah*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sidik, Machfud. 2002. *Kebijakan, Implementasi Dan Pandangan Ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah*. Seminar Nasional: "Menciptakan Good Governance demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal". Yogyakarta.

Sudarmono, Mulyanto. 2006. *Analisis Transformasi Struktural, Pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan Antar Daerah Di wilayah Pembangunan I Jateng*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara.

Sukirno, Sadono. 2006. *Pembangunan Daerah*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.



Supadmi, Ni Luh. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kelima. Penerjemah Haris Munandar. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Widodo, Triyanto. 1990. *Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Yudi. 2001. *Potensi Pengembangan Sektor-sektor Ekonomi Potensial untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Pemerintah Daerah Kota Pasuruan*. Tesis. Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Yusuf, Maulana. 1999. *Model Rasio Pertumbuhan ( MRP ) sebagai Salah Satu Alat Analisis Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota*. Aplikasi Model : Wilayah Bangka – Belitung, JEBI Vol.XLVII. No.2

